



# Pedagang Ancam Nekat Beroperasi

## ■ Pj Wali Kota: Buka Paksa Bisa Dituntut Secara Hukum

**YOGYA, TRIBUN** - Para pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta menyatakan akan nekat membuka kembali tokonya meski sejak Rabu (4/1) kemarin sudah disegel Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Mereka berharap segera diberi solusi oleh pemerintah setempat.

Koordinator Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan mengatakan, sampai saat ini pihaknya memilih untuk tidak berdagang sementara dan memberikan waktu kepada Pemkot Yogyakarta serta pihak terkait untuk memberikan solusi kepada mereka.

"Sampai saat ini kami memahami dulu. Kami akan tutup dulu mengikuti tapi harus ada solusi," kata Adi, Kamis (5/1).

Ia mengatakan bahwa pemerintah sudah berjanji untuk mengundang para pedagang di Jalan Perwakilan guna memberikan solusi terbaik mengenai masalah itu. Namun hingga saat ini, pihaknya belum juga mendapat kepastian waktu pertemuan tersebut.

"Sampai saat ini kami masih menunggu undangannya. Kemarin kita tanya kapan undangan itu akan datang juga tidak diberi kepastian," terangnya.

Namun, kata Adi, para pedagang tak bisa berdiri di situ terlalu lama. Mereka harus mulai kembali beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. "Jadi

**Niku wong ngerti aturan mboten, kok ajeng mbukak paksa (itu orang paham aturan apa tidak kok mau buka paksa) wong jelas manggon (sudah jelas menetap) di situ aja. Dari aspek hukum itu bisa dituntut penguasaan tanpa hak lho.**

canganya akan dilakukan pada akhir pekan ini. Jika menang nantinya belum ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Dia menambahkan, setidaknya ada 21 usaha di Jalan Perwakilan yang terdampak dari penyegekan kios-kios di sana. Total pengusaha beserta karyawan diperkirakan berkisar antara 200 orang.

Merespon hal itu, Penjabat Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan tindakan untuk membuka paksa kios dipertokan Jalan Perwakilan pasca penyegekan merupakan tindakan yang menyalahi aturan.

"Niku wong ngerti aturan mboten, kok ajeng mbukak paksa (itu orang paham aturan apa tidak kok mau buka paksa) siong jelas manggon (sudah jelas menetap) di situ aja. Dari aspek hukum itu bisa dituntut penguasaan tanpa hak lho," kata Sumadi.

Mengenai persoalan sewa menyewa pertokoan, Sumadi menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak mengurus hal itu. "Kuto mboten ngurus sing ewuh kok, niku ndeke Keraton kok njurus kero siong ki piye (saya enggak mengurus itu. Itu tanah Kraton kok sewa sama orang itu bagaimana) itu urusan-nya pedagang dengan yang sewa," tegasnya.

Sumadi menegaskan, Pemkot sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan rencana relokasi pedagang di Jalan Perwakilan. Bahkan sejak Agustus 2022 lalu, Pemkot memberikan alternatif relokasi di lantai atas Pasar Beringharjo atau Pasar Kliatan.

"Kok solusi belum ada gimana, le kondo sopo (yang bilang siapa redi). Saya sudah sejak Agustus (2022) sudah sosialisasasi," kata Sumadi.

Sumadi tak menampik bahwa dirinya belum bertemu secara langsung dengan para pedagang.

Namun, mantan Sekda Sleman ini mengaku telah mendeliasasikan bahawannya untuk menemui perwakilan pedagang guna mencari solusi.

"Saya kan sudah delegasikan, masa apa-apa harus saya, kan sudah ketemu pak sekda, ketemu teman-teman dari tata ruang, (dinas) kebudayaan. Podu mawon yang disampaikan omongan kulo," paparnya.

(hda/tro)

**JADI POLEMIS**

- Para pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta menyatakan akan nekat membuka kembali tokonya.
- Sejak Rabu (4/1) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah mensegel toko mereka.
- Pedagang berharap segera diberi solusi oleh pemerintah setempat.
- Pj Wali Kota menyebut membuka paksa kios tindakan yang menyalahi aturan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005